

KONFLIK NORMA HUKUM KEPAILITAN DAN HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP PENYITAAN ASET DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Umarul Faruq¹ dan Supriyadi²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul dari adanya konflik norma hukum kepailitan dan hukum acara pidana terhadap penyitaan aset dalam kasus korupsi, dan menganalisis pengaturan sita aset dalam perkara tindak pidana korupsi di masa mendatang agar dapat mencegah terjadinya konflik norma hukum kepailitan dan hukum acara pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian yang bersifat deskriptif dan dari sudut bentuknya, penelitian ini merupakan penelitian preskriptif. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Selanjutnya, hasil penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, akibat hukum dengan terjadinya konflik antara norma hukum acara pidana dengan hukum kepailitan terhadap aset yang disita hasil dalam kasus tindak pidana korupsi adalah adanya ketidakpastian hukum bagi Kurator dengan tertundanya atau tidak dapat dilaksanakannya pemberesan harta debitur pailit, dan kewenangan kreditur untuk menjual aset debitur pailit guna pemberesan utangnya menjadi hilang atau setidaknya-tidaknya menjadi berkurang terhadap penyelesaian piutangnya, baik untuk kepentingan kreditur separatis maupun kreditur preferen, sebab harus menunggu terlebih dahulu perkara pidananya selesai. Kedua, untuk dapat menghindari terjadinya konflik norma hukum acara pidana dengan hukum kepailitan di waktu yang akan datang dalam hal pengaturan penyitaan aset dari hasil tindak pidana korupsi perlu dilakukan harmonisasi norma hukum secara horizontal melalui *asas lex specialis derogat legi generali*, dimana sita umum dapat mengesampingkan sita pidana. Negara sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap aset yang disita hasil tindak pidana korupsi dapat didudukkan sebagai kreditur pemegang hak istimewa yang mendapat prioritas dalam harta pailit.

Kata Kunci: Konflik Norma, Kepailitan, KUHAP, Penyitaan aset.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.

² Dosen Pembimbing Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada.

***CONFLICT OF BANKRUPTCY LEGAL NORMS AND CRIMINAL
PROCEDURE LAW REGARDING ASSETS CONFIDENTIALITY IN CASES
CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION***

Umarul Faruq¹ and Supriyadi²

ABSTRACT

This research aims to analyze the legal consequences arising from the conflict between bankruptcy law norms and criminal procedure law regarding the confiscation of assets in corruption cases, and analyze the arrangements for confiscation of assets in cases of criminal acts of corruption in the future in order to prevent conflicts between bankruptcy law norms and procedural law. criminal.

This research is a normative legal research and descriptive research and from the point of view of its form, this research is a prescriptive research. The data used comes from secondary data in the form of primary legal materials, secondary and tertiary legal materials. The results of the study were then analyzed qualitatively.

*There are two conclusions drawn from the research and discussion. First, the legal consequences of a conflict between the norms of criminal procedure law and bankruptcy law regarding assets confiscated as a result of a criminal act of corruption are the existence of legal uncertainty for the Curator with the delay or inability to carry out the settlement of the bankrupt debtor's assets, and the creditor's authority to sell the bankrupt debtor's assets. in order to settle the debt, it will disappear or at least reduce the settlement of the receivables, both for the benefit of non-saparatist creditors and preferred creditors, because they have to wait first for the criminal case to be completed. Second, in order to avoid conflicts between criminal procedural law norms and bankruptcy law in the future in terms of regulating the confiscation of assets from the proceeds of criminal acts of corruption, it is necessary to harmonize legal norms horizontally through the principle of *lex specialis derogat legi generali*, where general confiscations can override confiscations. criminal. The state, as a party that has an interest in assets confiscated as a result of criminal acts of corruption, can be positioned as a creditor holding special rights that has priority in the bankruptcy estate.*

Keywords: Conflict of Norms, Bankruptcy, Criminal Procedure Code, Asset Confiscation.

¹ Student of the Master of Law Study Program at Gadjah Mada University.

² Supervisor of the Master of Law Study Program, Gadjah Mada University.